



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu disusun pedoman pelaksanaan pengelolaan dana Jaminan Persalinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nion fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
7. Dana Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan di suatu wilayah kerja yang ada di lingkungan Kabupaten Demak.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba.
11. Tim Pengelola Jampersal adalah Tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Demak.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dengan penanggung jawab institusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan pelayanan kesehatan.

## BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

### Bagian Kesatu Sasaran

#### Pasal 2

Sasaran Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di lokasi pada wilayah daerah yang memiliki akses jauh dari Fasilitas Kesehatan dan penduduk yang tidak mampu serta belum memiliki kartu jaminan kesehatan atau sumber pembiayaan yang lain.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten;
- b. menangani kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir; dan
- c. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

## BAB III PELAKSANA JAMPERSAL

#### Pasal 4

- (1) Jampersal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim Teknis Pelaksana Jampersal.
- (3) Tim Teknis Pelaksana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun bahan konsep dan rencana kerja kegiatan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan manajemen administrasi serta monitoring evaluasi ke fasilitas pelayanan kesehatan.

## BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL

#### Pasal 5

- (1) Dana Jampersal digunakan untuk:
  - a. rujukan persalinan dari rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- b. sewa dan operasional RTK;
  - c. pertolongan persalinan, Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan
  - d. dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal.
- (2) Rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rujukan ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
- a. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
  - b. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi, meliputi:
    - 1. rujukan dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan/atau
    - 2. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- (3) Sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sewa rumah;
  - b. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di PTK; dan
  - c. langganan air, listrik, kebersihan.
- (4) Pertolongan persalinan, Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. biaya jasa pertolongan persalinan;
  - b. perawatan kehamilan risiko tinggi;
  - c. pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan Dinas Pengendalian Penduduk; dan
  - d. perawatan dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).
- (5) Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. transpor lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan/atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis dan aksesibilitas;
  - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
  - c. honorarium pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil;
  - d. belanja jasa pengiriman spesimen; dan

- e. kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan, petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

#### Pasal 6

Penerima bantuan Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III pada Rumah Sakit sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

#### Pasal 7

Besaran Dana Jampersal ditetapkan sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan persalinan dan bayi baru lahir resiko tinggi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. jasa pelayanan Keluarga Berencana Implant/IUD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- c. jasa pelayanan Keluarga Berencana suntik sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

### BAB V

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN DANA JAMPERSAL

#### Pasal 8

- (1) Permohonan pembayaran dana Jampersal diajukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas penerima Jampersal berupa: kartu keluarga, kartu tanda penduduk;
  - b. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah;
  - c. nota/kuitansi pembayaran;
  - d. bukti surat rujukan dan/atau hasil pelayanan; dan
  - e. sewa RTK dilengkapi dengan akta/sertifikat/surat-surat kepemilikan rumah dan surat pemberitahuan tahunan (SPT).
- (2) Kepala Dinas memerintahkan pejabat/pegawai untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berkas permohonan pembayaran yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, sah dan memenuhi persyaratan, dilakukan pembayaran terhadap pelaksana program pelayanan Jampersal.
- (4) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, tidak sah dan/atau memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dengan disertai alasan-alasan.

#### Pasal 9

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Jampersal berupa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pencairan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Jampersal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring atas pelaksanaan Jampersal di wilayah Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksana Jampersal.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 12

Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan Jampersal kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 17 Juli 2018

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001